



**DĒWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIC INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI X DPR RI
(BIDANG: PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI,
PEMUDA DAN OLAHRAGA, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF,
DAN PERPUSTAKAAN NASIONAL)**

Tahun Sidang	: 2023 - 2024
Masa Persidangan	: II (Dua)
Sifat Rapat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)
Dengan	: Universitas Negeri Padang (UNP) dan Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI)
Hari/Tanggal	: Selasa, 21 November 2023
Pukul	: 13.19 – Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI
Pimpinan Rapat	: H. Syaiful Huda/Ketua Komisi X DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dadang Prayitna, S.IP., M.H./Kabagset. Komisi X.
Agenda	: 1. Pengajuan materi tentang Revolusi Pembelajaran; 2. Penyampaian Kajian BEM SI tentang Pendidikan Dasar, Menengah dan Tinggi
Hadir Komisi X DPR RI	: 34 orang dari 55 Anggota Komisi X DPR RI
Hadir	: 1. Dr. Refnaldi, S.Pd., M.Litt. (Plh Rektor/Wakil Rektor I Universitas Negeri Padang) 2. Prof. Dr. Herman Nirwana, M.Pd. (Guru Besar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang) 3. Prof. Dr. Prayitno, M. Sc. Ed. (Pakar Bimbingan Konseling Universitas Negeri Padang) 4. I Putu Bagus Padmanegara (Koordinator Isu Pendidikan Tinggi BEM SI Kerakyatan) 5. Chairul Soleh (Koordinator Isu Pendidikan Tinggi BEM SI Rakyat Bangkit) 6. Afgan Mabdanur Ramadhani (Koordinator Isu Pendidikan Dasar dan Menengah BEM SI Kerakyatan) 7. Faizal Akbar (Koordinator Isu Pendidikan Tinggi BEM SI Rakyat Bangkit)

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 13.10 WIB oleh H. Syaiful Huda/Ketua Komisi X DPR RI, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 281 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari **Universitas Negeri Padang (UNP)** dan **Aliansi BEM SI** serta menampung pertanyaan, saran dari anggota Komisi X DPR RI.

II. KESIMPULAN

1. Komisi X DPR RI mengapresiasi aspirasi dan masukan Universitas Negeri Padang (UNP) dan Aliansi BEM SI (bahan terlampir). Komisi DPR RI akan menindaklanjuti masukan masukan tersebut dengan menyampaikan kepada Kemendikbudristek RI agar menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.
2. Terhadap aspirasi dan masukan yang disampaikan Universitas Negeri Padang (UNP) dan Aliansi BEM SI, Komisi X DPR RI menyampaikan pandangan sebagai berikut:
 - a. Komisi X DPR RI akan menyampaikan kepada Kemendikbudristek RI hasil kajian mengenai Reformasi Pembelajaran untuk Menyukkseskan Revolusi Mental berdasar Pancasila.
 - b. Komisi X DPR RI konsisten mendorong penggunaan 20% APBN digunakan untuk fungsi pendidikan dan pengawasannya berada dalam koordinasi kementerian bidang pendidikan.
 - c. Komisi X DPR RI akan menindaklanjuti beberapa permasalahan yang disampaikan BEM SI antara lain mengenai :
 - (1) formula rumusan bantuan APBN untuk PTN
 - (2) PPDB
 - (3) Batasan atau ketentuan uang pangkal masuk perguruan tinggi
 - (4) Implementasi Permendikbud No. 30/2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi
 - (5) Nepotisme masuk PTN
 - (6) Fenomena dana mahasiswa yang ditahan oleh rektorat
 - (7) Kebebasan akademik yang perlu dibuka karena adanya fenomena perguruan tinggi tidak memiliki BEM
 - (8) Fenomena mahasiswa dikeluarkan dari kampus karena memprotes kebijakan kampus
 - d. Komisi X DPR RI mendesak Kemendikbudristek RI mengevaluasi kebijakan terkait mekanisme kuota menteri sebesar 30% dalam menentukan jabatan rektor.
 - e. Komisi X DPR RI mendesak Kemendikbudristek RI untuk menjelaskan mengenai SE Ditjen Dikti Kemendikbduristek RI Nomor 1035/E/KM/2020 tentang Imbauan Pembelajaran Secara Daring dan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja yang di dalamnya berisi larangan bagi mahasiswa untuk mengkritisi Undang-Undang Cipta Kerja.

III. PENUTUP

Rapat ditutup Pukul 16.29 WIB.

KETUA RAPAT

TTD.

H. Syaiful Huda